

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, A., & Maskanah, U. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Logoz.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 488–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>
- Arief, S., & Meuwissen. (2007). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Asikin, Z. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Djanggih, H. dan S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Law Journal*, 12(2).
- Erwin, Y. P. (2015). Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadaan Hubungan Industrial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/421>
- Gayo, A. A., Hukum, P. R., Riset, B., Brin, N., & By-nc, C. C. (2022). *PROBLEMATIK PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA DI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN COURT*

EXCELLENCE Problematic in The Civil Decision Execution Process in Indonesia in Order to Realize Court Excellence.

- Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- Hartati, R., & Syafrida. (n.d.). *HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA*.
- Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Kanisius.
- Mappong, Z. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Tunggal Mandiri.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- Nico, A. (1945). *Kompetensi Pengadilan*.
- Panget, A. E. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda. *Lex Administratum*, 1(3).
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Jurnal Varia Justicia*, 4(1).
- Pittaloka, E. S., & Pranoto. (2016). Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang. *Jurnal Privat Law*, 4(No. 1), 79–86.
- Putra, I. G. A. K. B. W. A., Widiati, I. A. P., & Uj, N. M. P. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan

- Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atmajaya.
- Santoso, Agus, M. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Soemadiningrat, Salman, O., & F.S, A. (2004). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Reflika Aditama.
- Soepomo, R. (1993). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita.
- Sumawuaya, C. I. T. R. A. (2016). *Fungsi Putusan S E L a Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata. (1979). *Hukum Acara Perdata*. Mandar maju.
- Syahrani, R. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*.
- Umar, D., & Handoyo, U. (2000). *Kamus Hukum*. Quantum Media Press.
- Wahyudi, H. Y. M. (2007). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Hukum*, 5, 1–11.
- Yadiman.H. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV

Het herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1)

Undang-Undang Mahkamah Agung

C. Jurnal

- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Djanggih, H. dan S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Law Journal*, 12(2).]
- Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Jurnal Varia Justicia*, 4(1).
- Karanganyar, T.-I. P. N. (2015). *Eksekusi*.